



MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI/  
KETUA BADAN PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI/  
KETUA DEWAN RISET NASIONAL

Jakarta, 1 Juni 1987

Nomor : 286/M/BPPT/VI/87  
Lampiran: ---  
Perihal : Pembangunan Kilang  
Ekspor dan  
Pemanfaatan kelebihan  
kapasitas kilang  
Balikpapan dan Dumai

Kepada Yth.  
Bapak Presiden Republik Indonesia  
di  
J a k a r t a

Dengan hormat,

Dengan surat ini, ada 2 hal yang ingin kami laporkan, yaitu mengenai kemungkinan pembangunan Kilang Ekspor di Indonesia dan Pemanfaatan kelebihan kapasitas dari kilang-kilang baru Balikpapan dan Dumai.

Pembangunan Kilang Ekspor di Indonesia

1. Didorong oleh hasil kunjungan Mrs. Margareth Thatcher ke Indonesia pada tahun 1985, yang menurut Foster Wheeler, oleh Perdana Menteri Inggris tersebut, kepada Bapak Presiden telah dijanjikan suatu bantuan dalam rangka kerjasama ekonomi untuk pembangunan Indonesia, maka Foster Wheeler telah menyusun suatu usulan (proposal) pembangunan sebuah kilang baru di Indonesia. Berdasarkan saran dan petunjuk dari Ir. Tabrani, Foster Wheeler dari Inggris telah menyampaikan kepada PERTAMINA dan BPP Teknologi satu usulan (proposal) mengenai pembangunan satu kilang minyak baru di Balikpapan. Setelah terhadap usulan tersebut dilakukan pengkajian oleh BPP Teknologi, maka kepada Foster



MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI/  
KETUA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI/  
KETUA DEWAN RISET NASIONAL

Wheeler telah disampaikan hasil pengkajian tersebut, bahwa pembangunan sebuah kilang baru di Balikpapan tidak ada dalam Rencana Korporat PERTAMINA, dan oleh karena itu, usulan Foster Wheeler sangat sukar atau lebih tepat tidak dapat dipertimbangkan atau diterima.

2. Kemudian oleh BPP Teknologi disarankan, bahwa jika Foster Wheeler masih berhasrat keras untuk mengembangkan proyek pembangunan sebuah kilang di Indonesia, maka karena Indonesia masih mempunyai kelebihan kapasitas kilang untuk suatu jangka waktu yang cukup lama, kilang yang akan dibangun tersebut harus berupa sebuah kilang yang berorientasi kepada ekspor (export oriented refinery) dan juga ditekankan, bahwa syarat-syarat yang diminta oleh PERTAMINA / Pemerintah Indonesia adalah amat berat.

3. Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:
- Kilang harus berupa Export Oriented Refinery.
  - Pembiayaan pembangunan kilang berdasarkan pembiayaan "NON RECOURSE".
  - Lokasi kilang adalah di pantai Utara Pulau Jawa, dengan kemungkinan besar antara Jakarta dan Cirebon.
  - Kapasitas kilang tersebut harus cukup untuk dapat menyisihkan dana ("processing fee" dikurangi biaya operasi) untuk pembayaran kembali hutang ("advance payment" dalam pembiayaan "non recourse"). Juga ada pembatasan, bahwa kapasitas kilang yang akan dibangun maksimal adalah 100.000 barrel per stream day.

4. Lokasi kilang di pantai Utara Pulau Jawa adalah yang paling baik, karena sepuluh atau lima belas tahun kemudian, kilang



MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI/  
KETUA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI/  
KETUA DEWAN RISET NASIONAL

ekspor tersebut akan berubah fungsinya menjadi kilang untuk keperluan dalam Negeri dan diperkirakan, kebutuhan BBM yang utama adalah di pantai Utara Pulau Jawa. Rencana lokasi tersebut juga dikaitkan dengan pipanisasi Pulau Jawa untuk penyaluran BBM hasil-hasil kilang, dalam arti, bahwa kilang di pantai Utara Pulau Jawa tersebut akan dapat sepenuhnya memanfaatkan jaringan (network) pipa BBM yang telah, sedang dan akan dipasang. Juga dengan adanya "Export Oriented Refinery" di pantai Utara Pulau Jawa tersebut, pelaksanaan penyaluran BBM melalui pipa untuk memenuhi kebutuhan Pulau Jawa dapat dipercepat. Hal ini dimungkinkan, karena dapat dilakukannya "swapping" (tukar-menukar) antara hasil-hasil BBM dari kilang-kilang Balikpapan dan Dumai untuk diekspor dan hasil kilang "Export Oriented Refinery" malah yang akan digunakan untuk kebutuhan di dalam negeri.

5. Foster Wheeler telah menyampaikan usulan pendahuluan (preliminary proposal) kepada PERTAMINA dan BPP Teknologi mengenai Export Oriented Refinery tersebut, yang pada dasarnya telah memenuhi semua persyaratan dasar yang diminta. Proyek kilang dengan syarat-syarat tersebut di muka tidak bertentangan dengan rencana pembangunan kilang yang ada di Rencana Korporat PERTAMINA.

Pemanfaatan kelebihan kapasitas kilang-kilang baru Balikpapan dan Dumai

6. Dengan telah dioperasikannya kilang-kilang baru Balikpapan dan Dumai secara lebih mantap, maka telah mulai kelihatan adanya kelebihan kapasitas dari kilang-kilang baru Balikpapan dan Dumai, terutama unit-unit Hydrocracker-nya. Untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, cukup dioperasikan



MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI/  
KETUA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI/  
KETUA DEWAN RISET NASIONAL

masing-masing satu dari dua "train" unit Hydrocracker yang terpasang di masing-masing kilang baru Balikpapan dan Dumai.

7. Dalam hubungan dengan optimasi operasi kilang, maka telah dipikirkan cara-cara pemanfaatan kelebihan kapasitas dari kilang-kilang tersebut. Oleh BPP Teknologi dan Direktorat Pengolahan PERTAMINA telah dijajagi dan dikaji kemungkinan-kemungkinan pemanfaatan kelebihan kapasitas tersebut.
8. Dari hasil pengkajian kemungkinan-kemungkinan pemanfaatan kelebihan kapasitas tersebut, dapat dilaporkan, bahwa cara pemanfaatan yang diperkirakan paling menguntungkan dan dapat dilakukan "segera" adalah bekerja-sama dengan perusahaan minyak besar seperti B P (British Petroleum) dengan mengikat perjanjian untuk pada dasarnya menerima CPD (Crude Processing Deal) secara kontinu dalam suatu jangka waktu tertentu. Juga ada kemungkinan bahwa kerja-sama CPD tersebut dapat dinegosiasikan untuk diperluas menjadi kerja-sama yang juga meliputi pemasaran hasil-hasil kilang ke luar negeri.

Pemanfaatan kelebihan kapasitas dari kilang Balikpapan dan Dumai sebagai operasi pendahuluan dari Kilang Ekspor.

9. Karena dengan CPD tersebut, yang diolah kemungkinan besar adalah crude Indonesia dan hasil-hasilnya akan dipasarkan ke luar negeri, maka pemanfaatan kelebihan kapasitas dari kilang-kilang Balikpapan dan Dumai tersebut dapat dianggap sebagai operasi pendahuluan atau Premarketing BBM dari Kilang Ekspor jika kelak dioperasikan.
10. Seperti telah ditulis pada laporan yang terdahulu, proyek dengan pembiayaan "non recourse" dapat dianggap sebagai



MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI/  
KETUA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI/  
KETUA DEWAN RISET NASIONAL

investasi modal asing ke Indonesia dan suatu "joint venture" yang longgar, maka rencana pembangunan kilang dengan orientasi ekspor seperti yang telah diuraikan di muka merupakan satu cara untuk dapat tetap melaksanakan pembangunan di Indonesia pada umumnya dan pembangunan kilang minyak pada khususnya.

11. Menurut informasi yang dapat diperoleh BPP Teknologi, Thailand juga merencanakan untuk membangun kilang yang berorientasi kepada ekspor. Agar tidak ketinggalan, Indonesia harus dapat bergerak dengan cepat dan mendahului rencana Thailand tersebut. Rencana yang lebih jelas mengenai pembangunan kilang ekspor di Indonesia akan dapat "men-cegah" dibangunnya kilang ekspor di Thailand.

Demikian adalah hal-hal yang dapat kami sampaikan, kami sangat mengharapkan Bapak Presiden dapat menugaskan PERTAMINA untuk mulai memproses dan melakukan negosiasi dengan British Petroleum dan Foster Wheeler mengenai kedua proyek tersebut pada judul surat ini. Kemudian kami mohon pengarahan lebih lanjut dari Bapak Presiden dan atas perhatian Bapak diucapkan banyak terima kasih.

Menteri Negara Riset dan Teknologi/  
Ka. BPP Teknologi

Prof. Dr. - Ing. B.J. Habibie )